

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

Karesidenan yaitu pembagian administratif menjadi suatu provinsi yang dahulu dilaksanakan di Indonesia atau dulu memiliki sebutan Hindia Belanda yang dipergunakan sampai tahun 1950-an. Ketika masa Hindia Belanda, karesidenan dibagi atas beberapa kabupaten di wilayah-wilayah tertentu. Di Indonesia tidak semua provinsi memiliki karesidenan; namun, pulau-pulau seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Lombok, dan Sulawesi memiliki karesidenan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk sangatlah banyak.

Semenjak adanya krisis yang telah terjadi di tahun 1950-an, sudah tidak terdapat karesidenan lagi yang menjadikan pemerintahan sekarang adanya kabupaten. Namun, istilah "eks-karesidenan" tetap digunakan secara tidak resmi. Salah satu keunggulan dari penggunaan karesidenan adalah dalam penomoran kendaraan bermotor (plat nomor), terutama di pulau Jawa yang masih sering mengacu pada karesidenan dalam pembagiannya. Pada masa kolonial Belanda, Pati tidaklah sebuah Kabupaten yang dengan administratif langsung bertempat di bawah Provinsi, melainkan pada masa itu masih berada di lingkup wilayah Karesidenan. Gedung Karesidenan Pati ini dibangun oleh Belanda sekitar tahun 1800 berbentuk bangunan kuno yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman, tepatnya depan SMAN 1 Pati, Jawa Tengah.

Gedung karesidenan ini awal mulanya digunakan sebagai tempat tinggal Presiden Belanda untuk wilayah karesidenan Pati. Melainkan dari itu digunakan sebagai rumah dinas bagi Kepala Bakorwil 1 Jawa Tengah. Terlihat dari luarnya, bangunan tersebut sangat kokoh dengan bentuk desain yang khas zaman dahulu, dibersamai dengan luasnya halaman dan danau buatan yang bertanamkan bunga teratai berwarna merah. Hal ini menggambarkan bahwasanya bangunan yang dibangun memiliki kemiripan seperti istana pada masanya dan terlihat megah dari ukurannya masa itu.

Karesidenan Pati (Muria Raya sebutannya) merupakan suatu hasil dari pembagian administratif yang sudah ada di Jawa Tengah, Hindia, Belanda, kemudian Indonesia yang bertempat di Kota Pati sebagai Pusat Pemerintahannya. Karesidenan Pati

sekarang ini memiliki enam kabupaten dari di Jawa Tengah. Yang termasuk wilayah Eks-Karesidenan Pati meliputi:

a. Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang, salah satu dari 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas sebesar 3,1% dari luas total Provinsi Jawa Tengah. Berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa bagian timur, Kabupaten Rembang bersebelahan dengan Jawa Timur, dan posisinya sebagai simpul strategis di jalur pantai utara Pulau Jawa. Aksesibilitas Kabupaten Rembang semakin meningkat dengan reaktivasi jalur rel kereta api di bagian utara Pulau Jawa (Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang), selain melalui jalan raya.

Dari segi letak geografis, Kabupaten Rembang cenderung mengalami perkembangan menuju Barat dan Timur, menunjukkan pentingnya jalur transportasi regional di pantai Utara Pulau Jawa. Selain itu, dalam perkembangannya, Kabupaten Rembang juga mengalami pertumbuhan ke arah Selatan secara linier, mengindikasikan keterkaitannya yang erat dengan wilayah sekitarnya, terutama Kabupaten Tuban, Blora, dan Pati. Keadaan ini menjadi keunggulan dan daya tarik alamiah yang signifikan.¹

b. Kabupaten Pati

Kabupaten Pati satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan terletak di bagian timur provinsi tersebut. Wilayah Kabupaten Pati bersebelahan langsung dengan beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Jepara, Kudus, Rembang, dan Grobogan. Kabupaten Pati memiliki luas total wilayah sebesar 150.368 km persegi menjadi salah satu daerah bagian timur dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Luas total 150.368 hektar, Kabupaten Pati terdiri dari 30.755 hektar lahan non pertanian, 60.314 hektar lahan non sawah, dan 59.299 hektar lahan sawah. Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan, 5 kelurahan serta 406 desa yang tersebar diseluruh wilayahnya. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan wilayah terkecil di

¹ "Kabupaten Rembang," Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, n.d., <https://cjp.jatengprov.go.id/profil-kabkota/16>.

Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Wedarijaksa. Selain itu Kecamatan di kabupaten Pati yang memiliki desa terbanyak yaitu Kecamatan Winong yakni sebanyak 30 desa, sedangkan yang memiliki desa tersedikit yaitu Kecamatan Gembong yakni sebanyak 11 desa. Sedangkan Kecamatan yang memiliki desa dan kelurahan yaitu Kecamatan Pati (Pati Kota) yakni sebanyak 29 desa dan 5 kelurahan.²

c. Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus ialah satu dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas terkecil di antara kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus berjarak sekitar \pm 51 km dari ibu kota Provinsi. Kabupaten Kudus bagian utara bersebelahan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, bagian barat bersebelahan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, bagian selatan bersebelahan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, dan di bagian timur bersebelahan dengan Kabupaten Pati.

Wilayah Kudus sebagian besarnya terdiri dari dataran rendah yang berada di bagian selatan, sementara terdapat pegunungan di sebagian wilayah utara. Letak Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi strategis sebagai bagian dari jalur pantura yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Meskipun luas wilayahnya terkecil di antara kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah (42.561 Ha), peran serta kontribusi Kabupaten Kudus memiliki signifikansi yang penting dan tidak bisa diabaikan. Dapat diamati bahwa Kudus memiliki sektor industri yang menjadi kebanggaan nasional dan internasional, didukung oleh masyarakatnya yang memiliki dedikasi kerja tinggi, menjadikan Kudus sebagai pusat industri di Jawa Tengah. Industri tersebut meliputi, kertas, dan elektronik.³

d. Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara letaknya menjadikannya wilayah paling utara di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota

²“Profil Kabupaten Pati,” Pemerintah Kabupaten Pati, <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/>.

³ “Profil Kabupaten Kudus,” Pemerintah Kabupaten Kudus, n.d., https://kuduskab.go.id/page/profil_kabupaten_kudus.

Kabupaten Jepara adalah kota Jepara, yang jaraknya kira-kira 71 kilometer dari Ibu Kota Provinsi dan membutuhkan waktu perjalanan lebih dari 2 jam untuk mencapainya. Kabupaten Jepara memiliki luas daratan sekitar 1.004,132 km² dengan garis pantai yang membentang sejauh 82 km. Selain itu, wilayahnya juga perairan seluas 1.845,6 km², yang termasuk 27 pulau di Kecamatan Karimunjawa, di mana 5 di antaranya berpenghuni dan 22 lainnya tidak. Kabupaten Jepara terdiri atas 195 desa atau kelurahan yang dibagi menjadi 16 Kecamatan. Salah satu kecamatan terpisah dari Pulau Jawa adalah Kecamatan Pulau Karimunjawa. Baik desa maupun kelurahan di Kabupaten Jepara, menurut klasifikasi, masuk dalam kategori swasembada.⁴

e. Kabupaten Grobogan

Dari sisi geografis, setelah Cilacap, kabupaten grobogan menjadi kabupaen kedua terluas di Jawa Tengah yang bersebelahan dengan sembilan kabupaten lainnya. Pusat administrasinya terletak di Purwodadi. Dari sisi geografisnya, Grobogan terletak di lembah yang dikelilingi oleh dua pegunungan kapur, yaitu dibagian selatan adalah Pegunungan Kendeng dan dibagian utara adalah Pegunungan Kapur. Wilayah tengahnya berupa dataran rendah. Pegunungan tersebut menjadi sumber hutan yang berperan sebagai resapan air hujan serta area pertanian, meskipun tanahnya memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Daerah ini memiliki topografi yang bergelombang.⁵

f. Kabupaten Blora

Blora Mustika merupakan slogan terkenal dari Kabupaten Blora. Dari sisi tata kelola terletak di bagian timur Jawa Tengah dan bersebelahan dengan Jawa Timur. Luas wilayahnya mencapai 195.582.074 km², yang setara dengan 5,59 persen luas dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Blora dikenal pula sebagai salah satu kota yang menghasilkan kayu jati terbaik di Indonesia.⁶

⁴ “Profil Kabupaten Jepara,” n.d., <https://tirto.id/profil-kabupaten-jepara-sejarah-letak-geografis-dan-peta-gAGg>.

⁵ “Profil Kabupaten Grobogan,” n.d., <https://cjp.jatengprov.go.id/profil-kabkota/18>.

⁶ “Profil Kabupaten Blora,” n.d., <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/165>.

2. Deskripsi Objek

Penelitian ini mempergunakan informasi sekunder mengenai jumlah penduduk, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Eks-Karesidenan Pati. Data bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah melalui publikasi resmi di situs web BPS Provinsi Jawa Tengah:

- 1) Informasi mengenai jumlah penduduk berasal dari BPS Jawa Tengah mencakup periode tahun 2018-2022.
- 2) Informasi mengenai upah minimum yang diambil dari BPS Jawa Tengah mencakup rentang tahun 2018-2022.
- 3) Informasi mengenai pertumbuhan ekonomi diambil dari BPS Jawa Tengah mencakup periode tahun 2018-2022.
- 4) Informasi mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berasal dari BPS Jawa Tengah dan mencakup tahun 2018-2022.

Data dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai jumlah penduduk, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2018 hingga 2022 di wilayah Eks-Karesidenan Pati.

1) Jumlah Penduduk

Penduduk merujuk pada istilah yang mengacu kepada orang-orang yang bertempat pada satu wilayah dalam kurun waktu tertentu, hasil dari faktor demografi seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan.⁷ Data populasi yang diambil sebagai sampel untuk penelitian ini mencakup enam kabupaten di Eks-Karesidenan Pati:

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Eks-Karesidenan Pati
Tahun 2018-2022 (Jiwa)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Rembang	633.584	638.188	645.333	647.766	650.770
Pati	1.253.299	1.259.590	1.324.188	1.330.983	1.339.572
Kudus	861.430	871.311	849.184	852.443	856.472
Jejara	1.240.600	1.257.912	1.184.947	1.188.510	1.192.811
Grobogan	1.371.610	1.377.788	1.453.526	1.460.873	1.470.150
Blora	862.110	865.013	884.333	886.147	888.224

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

⁷ S. Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 45.

Berdasarkan data yang diambil dari BPS Jawa Tengah pada tabel 4.1 menunjukkan Jumlah Penduduk dari 6 kabupaten di Eks-Karesidenan Pati tahun 2018-2022. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa keenam kabupaten di Eks-Karesidenan Pati terus mengalami penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Kabupaten Grobogan mempunyai jumlah penduduk dengan rata-ratanya paling banyak lima tahun, menurut data tersebut. Sedangkan rata-rata jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Rembang.⁸

2) Data Upah Minimum

Upah dapat dijelaskan sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja sebagai pengganti kontribusi fisik atau mental yang diberikan kepada pengusaha. Jumlah keseluruhan upah ditentukan sebagai ganti layanan yang diberikan oleh tenaga kerja, dengan melibatkan periode waktu atau persyaratan tertentu.⁹

Upah Minimum ialah jumlah upah terkecil yang diterapkan bersama-sama di seluruh kabupaten/kota disatu provinsi. Setiap kabupaten/kota dalam provinsi tersebut memiliki UM yang setara. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Pengupahan Provinsi. Sebaliknya, UM di tingkat kota/kabupaten ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan mempertimbangkan berbagai pihak terkait.¹⁰ Data mengenai upah minimum ini melibatkan enam kabupaten di Eks-Karesidenan Pati dan menjadi fokus penelitian ini:

⁸ BPS Provinsi Jawa Tengah "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa)" <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/775/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>.

⁹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95.

¹⁰ Nurlaila Maysaroh Chairunnisa and Yuha Nadhirah Qintharah, 'Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020', *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7.1 (2022), 147–61.

Tabel 4.2
Data Upah Minimum Eks-Karesidenan Pati
Tahun 2018-2022 (Rp)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Rembang	1.535.000	1.660.000	1.802.000	1.861.000	1.874.322
Pati	1.585.000	1.742.000	1.891.000	1.953.000	1.968.339
Kudus	1.892.500	2.044.467	2.218.451	2.290.995	2.293.058
Jepara	1.739.360	1.879.031	2.040.000	2.107.000	2.108.403
Grobogan	1.560.000	1.685.500	1.830.000	1.890.000	1.894.032
Blora	1.564.000	1.690.000	1.834.000	1.894.000	1.904.196

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data yang diambil dari BPS Provinsi Jawa Tengah pada tabel 4.1 menunjukkan Upah Minimum dari 6 kabupaten di Eks-Karesidenan Pati tahun 2018-2022. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa keenam kabupaten di Eks-Karesidenan Pati terus mengalami kenaikan upah minimum setiap tahunnya. Menurut data tersebut, Kabupaten Kudus memiliki rata-rata upah minimum yang tertinggi, sementara Kabupaten Rembang memiliki rata-rata upah minimum yang terendah.¹¹

3) **Data Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada perubahan produksi barang dan jasa di wilayah ekonomi dari tahun ke tahun berikutnya, diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto dengan harga konstan. PDRB mencakup keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan produksi yang terjadi dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.¹² Berikut adalah daftar tingkat pertumbuhan ekonomi di Eks-Karesidenan Pati yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4.3
Data Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Eks-Karesidenan Pati Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Rembang	5,89	5,2	-1,49	3,85	5,55
Pati	5,71	5,81	-1,16	3,38	5,56

¹¹ BPS Provinsi Jawa Tengah, "Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah", <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/708/1/upah-minimum-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

¹² M. Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro Edisi Ketiga* (Jakarta: LPF-UI, 2008), 68.

Kudus	3,24	3,09	-3,11	-1,54	2,23
Jepara	5,85	6,02	-1,92	4,63	5,95
Grobogan	5,83	5,37	-1,57	3,78	5,98
Blora	4,38	4,05	-4,56	3,68	2,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data yang diambil dari BPS Provinsi Jawa Tengah pada tabel 4.3 menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi dengan didasarkan harga konstan 6 Kabupaten di Eks-Karesidenan Pati tahun 2018-2022. Terlihat dari tabel diatas bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di enam kabupaten di Eks-Karisidenan Pati mengalami naik turun. Namun, pada tahun 2020 semua kabupaten mengalami penurunan akibat Covid19. Namun, dari 6 kabupaten tersebut Kabupaten Blora mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi paling rendah pada tahun 2020, dengan angka sebesar -4,56%. Di sisi lain, kabupaten Jepara mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di tahun 2019, dengan angka sebesar 6,02%.¹³

4) Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase orang yang tidak memiliki pekerjaan dalam kelompok usia produktif, dihitung sebagai bagian dari total populasi yang sedang mencari atau dapat bekerja. Populasi yang dimaksud mencakup individu yang aktif bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sementara tidak bekerja.¹⁴ Data TPT berikut digunakan sebagai sampel penelitian:

Tabel 4.4
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Eks-Karesidenan Pati Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Rembang	2,83	3,6	4,83	3,67	1,76
Pati	3,57	3,64	4,74	4,6	4,45
Kudus	3,28	3,8	5,53	3,77	3,21
Jepara	3,75	2,92	6,7	4,23	4,1
Grobogan	2,22	3,54	4,5	4,38	4,4

¹³ BPS Provinsi Jawa Tengah, “Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)”, <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1743/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

¹⁴ Ardian, Syahputra, and Dermawan, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia.”

Blora	3,3	3,82	4,89	3,81	3,7
-------	-----	------	------	------	-----

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan yang tercantum pada tabel 4.4 yang diambil dari BPS Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6 kabupaten di Eks-Karesidenan Pati tahun 2018-2022. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa TPT di 6 kabupaten di Eks-Karesidenan Pati mengalami naik turun. Namun, pada tahun 2020 semua kabupaten mengalami peningkatan akibat Covid19. Dari data tersebut menunjukkan yang memiliki TPT paling tinggi adalah kabupaten Jepara pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,70%. Sedangkan dari semua data, TPT terendah adalah kabupaten Rembang pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,76%.¹⁵

B. Analisis Data Penelitian

Analisis data dimaksudkan memenuhi tujuan penelitian yang ditetapkan. Data panel yang terkumpul dalam studi ini diolah menggunakan perangkat lunak Eviews9 untuk memastikan hasil yang akurat. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif untuk meneliti dampak jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Eks-Karesidenan Pati, dengan menerapkan analisis regresi data panel.

1. Model Estimasi Data Panel

Studi ini memanfaatkan data panel, yakni perpaduan data *time series* dan data *cross section*. Untuk menerapkan regresi data panel secara efektif, penelitian perlu memastikan model yang cocok. Untuk mengestimasi regresi, tiga pendekatan yang bisa digunakan, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

2. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan model paling cocok untuk penelitian ini, diperlukan pengujian untuk memilih model CEM, FEM atau REM. Pemilihan model optimal dapat dicapai dengan sejumlah pengujian berikut ini:

a. Uji Chow

Uji *Chow-test* digunakan untuk mengevaluasi signifikansi Metode Efek Tetap (MET) untuk

¹⁵ BPS Provinsi Jawa Tengah Tengah, "Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah", <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/64/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>.

menentukan apakah MET lebih efektif daripada *Ordinary Least Square* (OLS). Pengujian ini melibatkan penggunaan statistik uji F atau chi-kuadrat.

Tabel 4.5
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.110129	(5,21)	0.3849
Cross-section Chi-square	7.035950	5	0.2180

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Hipotesis pengujian model ini adalah sebagai berikut:

H0 : CEM terpilih jika (prob. > 0,05)

H1 : FEM terpilih jika (prob. < 0,05)

Dari uji *Chow* menghasilkan nilai *probability* dari *cross-section Chi-square* sebesar 0,218 > 0,05 maka yang diterima ialah H0, artinya model terpilih adalah CEM.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dipergunakan memilih model antara REM dengan FEM. Pengujian hausman menghasilkan berikut ini:

Tabel 4.6
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.215564	3	0.3596

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Hipotesis pengujian model ini adalah sebagai berikut:

H0 : REM jika (prob. > 0,05)

H1 : FEM jika (prob. < 0,05)

Dari pengujian *hausman* paa tabel diatas diperoleh nilai *prob. cross-section Random* 0,3596 > 0,05, yang artinya bahwa dalam uji *hausman*, H0 diterima. yang artinya model terpilih adalah REM.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Pengujian ini guna mengetahui REM apakah lebih baik dari metode CEM. Hasil uji LM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.028061 (0.8670)	1.443762 (0.2295)	1.471823 (0.2251)

Sumber: data sekunder yang diolah

Hipotesis pengujian model ini adalah sebagai berikut:

H0 = CEM (prob > 0,05)

H1 = REM (prob < 0,05)

Nilai *breusch-pagan* dari *Cross Section* diatas adalah 0,867 > 0,05, maka terbaik dari pengujian yang telah dilakukan dari uji *chow*, uji *hausman*, dan uji LM, yang terpilih ialah CEM.

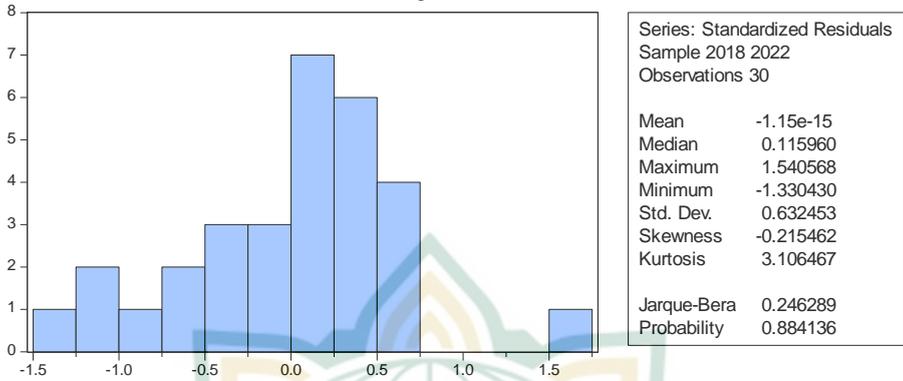
3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas guna menguji variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak.¹⁶

¹⁶ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Sumber: data sekunder yang diolah

Menurut hasil uji normalitas dihasilkan persebaran datanya berdistribusi normal dengan hasil nilai probabilitas 0.8841 > α (0.05), yang mana nilai tersebut melampaui dari nilai signifikansi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari dilakukannya uji multikolinieritas untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel bebas dalam regresi.¹⁷

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1	0.028399	0.155480
X2	0.028399	1	-0.418979
X3	0.155480	-0.418979	1

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0,028 < 0,85, X1 dan X3 sebesar 0,155 < 0,85, dan X2 dan X3 sebesar -0,418 < 0,85. Maka kesimpulannya pengujian ini terbebas multikolinieritas atau lolos uji mutikolenieritas.

¹⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 105.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengevaluasi variansi galat bersifat tetap /konstan (homoskedastis) atau berubah-ubah (heteroskedastis).¹⁸

Tabel 4.9

Uji Heteroskedastisitas				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.858667	11.13191	-0.885622	0.3839
X1	-0.023505	0.263603	-0.089168	0.9296
X2	0.742450	0.753170	0.985767	0.3333
X3	-0.015488	0.025850	-0.599137	0.5543

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari uji heteroskedastisitas nilai probabilitas dari semua variabel dependen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari α (0.05) yaitu variabel jumlah penduduk (X1) terbilang 0,9296, variabel upah minimum (X2) terbilang 0,3333, dan pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 0,5543. Sehingga, data penelitian ini tidak ada heteroskeastisitas, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi ialah korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu atau urutan tempat. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum.¹⁹

Tabel 4.10

Uji Autokorelasi

Mean dependent var	3.918000
S.D. dependent var	0.948688
Akaike info criterion	2.154342
Schwarz criterion	2.341169
Hannan-Quinn criter.	2.214110
Durbin-Watson stat	1.765140

¹⁸ Dedi Rosadi, *Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan Dengan R* (Yogyakarta: C.V Offset, 2011), 272.

¹⁹ R . Gunawan Sudarmanto, *Analisis Regresi Linear Ganda Dengan SPSS* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 142-143.

Sumber: data sekunder yang sudah diolah

Berdasarkan uji Durbin-Watson stat menunjukkan hasil sebesar 1,765, maka kesimpulannya penelitian ini tidak terjadi Autokorelasi, terbukti dari angka D-W di antara -2 sampai +2.

4. Analisa Regresi Data Panel

Setelahnya model regresi terpilih dan dipastikan bahwasannya data memenuhi uji asumsi klasik, selanjutnya melakukan analisis regresi data panel. Model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

$$TPT = -26,1023 + 1,1517 (\text{Jumlah Penduduk}) + 1,0174 (\text{Upah minimum}) - 0,1941 (\text{pertumbuhan ekonomi}) + e$$

Berikut merupakan penjelasan dari rumus diatas:

- a) Nilai konstanta sebesar 26,280 artinya jika variabel bernilai lain nilainya konstan, maka nilai pengangguran terbuka sebesar 26,280 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- b) Jumlah Penduduk dengan koefisien 1,1517, menunjukkan bahwa ketika jumlah penduduk suatu wilayah naik satu unit, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga diperkirakan naik sebesar 1,1517, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- c) Upah Minimum dengan koefisien 1,0174. Ketika upah minimum suatu wilayah naik satu unit, diperkirakan TPT juga akan naik sebesar 1,0174, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- d) Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien -0,1941. Jika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah naik satu unit, diperkirakan TPT akan turun sebesar 0,1941, dengan asumsi variabel lainnya tetap..

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari uji T parsial, uji F simultan, dan uji koefisien determinasi (R^2). Adapun berikut ini merupakan analisis datanya:

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji T bermaksud untuk menguji tiga hipotesis penelitian yaitu jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Eks-Karesidenan Pati tahun 2018-2022. Berikut adalah tabel uji T statistik dalam penelitian ini:

Tabel 4.11

Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-26.10231	18.74154	-1.392752	0.1755
X1	1.151721	0.443798	2.595146	0.0153
X2	1.017448	1.268028	0.802386	0.4296
X3	-0.194134	0.043520	-4.460772	0.0001

Sumber: data sekunder yang sudah diolah

Kesimpulannya, *output* tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

a) Jumlah Penduduk(X1)

Hipotesis penelitian terpresentasi sebagai berikut:

H0: Jumlah Penduduk tidak memberi pengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka.

H1: Jumlah Penduduk memberi pengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dari hasil perhitungan pada tabel dihasilkan angka T_{hitung} terbilang 2,595 > T_{tabel} terbilang 2,048 dengan angka signifikansi 0,015 < 0,05, maka H1 diterima serta H0 ditolak. Disimpulkan bahwasannya dalam uji parsial ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel Jumlah Penduduk kepada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka.

b) Variabel Upah Minimum (X2)

Hipotesis penelitian terpresentasi berikut ini:

H0: Upah Minimum tidak memberi pengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka.

H2: Upah Minimum memberi pengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dari hasil perhitungan dihasilkan angka T_{hitung} terbilang 0,802 < T_{tabel} terbilang 2,048 dengan angka signifikansi 0,429 > 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya Upah Minimum tidak memberi pengaruh secara parsial kepada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka.

c) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3)

Hipotesis penelitian ini terpresentasikan berikut ini:

H0: Pertumbuhan Ekonomi tidak memberi pengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka.
 H3: Pertumbuhan Ekonomi memberi pengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dari hasil perhitungan dihasilkan angka $T_{hitung} - 4,460 > T_{tabel}$ terbilang 2,048 dengan angka signifikansi $0,0001 < 0,05$, maka H3 diterima. Kesimpulannya, dalam parsial pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh secara negatif serta signifikan kepada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F ditujukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen memberi pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Uji F

R-squared	0.555564
Adjusted R-squared	0.504283
S.E. of regression	0.667944
Sum squared resid	11.59989
Log likelihood	-28.31514
F-statistic	10.83372
Prob(F-statistic)	0.000085

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari uji F simultan menggunakan *Common Effect Model* (CEM) di atas, nilai F_{hitung} sebesar $10,833 > F_{tabel}$ sebesar 2,975 dengan probabilitas F nilainya sebesar $0.000085 < \alpha 0.05$. Maka secara simultan jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pertumbuhan Terbuka (TPT) di Eks-Karesidenan Pati ahun 2018-2022.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) ialah uji untuk mengetahui antara variabel X dengan variabel Y dalam suatu persamaan regresi apakah hubungannya berkesesuaian.²⁰

²⁰ Suharyadi and Purwanto S.K, *Statistika Untuk Ekonomi Keuangan Modern* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 217.

Tabel 4.13**Uji R²**

R-squared	0.555564
Adjusted R-squared	0.504283
S.E. of regression	0.667944
Sum squared resid	11.59989
Log likelihood	-28.31514
F-statistic	10.83372
Prob(F-statistic)	0.000085

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari hasil menggunakan CEM, pengaruh variabel yaitu jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pertumbuhan Terbuka (TPT) diperoleh nilai *Adjusted- R-Squared* sebesar 0.5042, artinya 50% Tingkat Pertumbuhan Terbuka (TPT) terpengaruh oleh jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 0,4958 atau 50% terpengaruh oleh variabel lain diluar penelitian.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Eks-Karesidenan Pati

Didasarkan pada telah dilakukannya uji statistik, terbukti bahwa tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Eks-Karisidenan Pati mengalami kenaikan yang signifikan ketika jumlah penduduk juga naik. Dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$, dan nilai T_{hitung} sebesar $2,595 > T_{tabel}$ sebesar 2,048. Maka, disimpulkan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel jumlah penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Sebagai hasilnya, dalam penelitian ini hipotesis pertama (H1) dapat diterima.

Perubahan dalam jumlah penduduk dari waktu ke waktu dapat memiliki dampak yang bisa mendorong atau bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi. Di lain sisi, pertumbuhan populasi juga dapat menjadi faktor yang menghambat, terutama jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja atau kesempatan usaha, yang dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu, ketika terjadi kenaikan penduduk namun lapangan kerjanya tidak dapat menyeimbangi jumlahnya, maka hal tersebut dapat

mengakibatkan peningkatan angka pengangguran yang memberikan beban tambahan pada ekonomi suatu wilayah.

Dalam perspektif Islam, kenaikan jumlah penduduk dapat memengaruhi tingkat pengangguran karena bertambahnya jumlah individu yang mencari pekerjaan. Dalam Islam, lebih diutamakan memiliki keturunan yang berkualitas daripada sekadar jumlah yang besar. Islam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan untuk menciptakan peluang kerja bagi semua orang. Karenanya, pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam pengembangan kebijakan dan program yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan peluang kerja yang cukup untuk menampung jumlah penduduk yang bertambah. Ini juga melibatkan peningkatan investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan pekerjaan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri. Hasilnya penelitian ini serupa dengan hasil yang dieliti oleh Cut Fera Rahmanita dan Umaruddin Usman pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berdampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat penganggura.²¹

2. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Eks-Karesidenan Pati

Berdasarkan hasil analisis statistik, ditemukan bahwa upah minimum tidak memengaruhi secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Eks-Karesidenan Pati. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,429, yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 0,05 ($0,429 > 0,05$), dan nilai T_{hitung} sebesar 0,802 juga lebih kecil dari T_{tabel} yang sebesar 2,048 ($0,802 < 2,048$). Maka, disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Sebagai hasilnya, dalam penelitian ini hipotesis (H2) ditolak.

Kewajiban Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat menghambat upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi untuk tetap kompetitif. Oleh karena itu, dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), pemerintah memperhitungkan situasi keuangan perusahaan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pengusaha. Hal ini

²¹ Cut Fera Rahmanita and Umaruddin Usman, 'Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Wilayah Sumatera', *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12.1 (2023), 32.

dilakukan untuk menghindari lonjakan biaya tenaga kerja yang besar, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan tanga kerja dalam penawaran dan permintaan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah penurunan lapangan kerja karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan peluang kerjanya.

Dalam konteks ekonomi Islam, konsep keadilan sosial menjadi faktor penting. Islam menekankan perlunya memberikan upah yang layak dan adil kepada pekerja sebagai bagian dari prinsip keadilan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun peningkatan upah minimum mungkin meningkatkan biaya bagi pengusaha, itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja yang akan memperoleh upah yang lebih layak.

Dalam praktiknya, penyesuaian upah minimum dalam sudut pandang ekonomi Islam akan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak-hak pekerja dan mempertahankan daya saing ekonomi. Hal ini bisa dilakukan melalui dialog dan konsultasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan keadilan sosial.

Temuan penelitian ini sama dengan yang diteliti oleh Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia pada tahun 2021, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Upah Minimum tidak berdampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran.²²

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Eks-Karesidenan Pati

Hasil analisis statistik menghasilkan pertumbuhan ekonomi berdampak negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Eks-Karisidenan Pati. Ini terbukti dari nilai signifikansi yang diperoleh besarnya dibawah tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05) yaitu sebesar 0,0001 ($0,0001 < 0,05$), serta besarnya nilai T_{hitung} -4,460 yang melibihi secara negatif dari T_{tabel} yang sebesar 2,048 ($-4,460 > 2,048$). Oleh sebabnya, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan Tingkat

²² Soeharjoto and Mitha Rachma Oktavia, 'Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia', *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5.2 (2021), 94–102.

Pengangguran Terbuka. Sebagai hasilnya, penelitian ini merima hipotesis ketiga (H3).

Ada korelasi berlawanan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pada saat laju pertumbuhan ekonomi tinggi, dapat dipastikan bahwa tingkat pengangguran akan menurun. Dalam skenario ini, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi mengakibatkan perluasan roda-roda ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan output. Dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, jumlah pengangguran otomatis menurun. Penelitian oleh ekonom Arthur Okun, yang dikenal dengan Hukum Okun, mengindikasikan terdapat hubungan invers antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Artinya, terdapat penurunan tingkat pengangguran seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya.

Dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan distribusi yang adil. Ini berarti menghindari ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata di antara seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan atau berada dalam kondisi pengangguran. Maka, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi tingkat pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sehat diyakini dapat mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan. Ketika ekonomi tumbuh, lapangan kerja baru diciptakan sebagai hasil dari peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk bekerja dan menyokong keluarga mereka.

Temuan dari penelitian ini sejalan penelitian Riska Garnella dan rekan pada tahun 2020, di mana penelitiannya menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdampak negatif yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.²³

²³ Riska Garnella, Nazaruddin A. Wahid, and Yulindawati, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh', *JIMEBIS*, 1.1 (2020), 23.